



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN GREGED**



**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon tahun 2023 merupakan penjabaran Visi Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk berusaha menjabarkan Visi Bupati Cirebon dengan mencakup berbagai aspek pembangunan.

Secara umum materi Rencana Kerja Kecamatan Greged berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Greged sebagai mitra dan Pemandu Masyarakat yang tangguh dalam pemberdayaan masyarakat guna terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat yang sejahtera.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan yang dijabarkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Sekertaris, semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta seluruh pegawai yang telah bersama-sama merumuskan rancangan Rencana Kerja dan berharap seluruh masyarakat juga dapat membantu dalam implementasinya.

Greged, Februari 2022

CAMAT GREGED



RATNA KARTIKA, S.AP.M.Si

Pembina

NIP. 19680706 199307 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	5
1.3.Maksud Dan Tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan	8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2021	10
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2021	10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Greged	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Greged	29
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022	34
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Greged	42
Bab V Penutup	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program ,kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Renja SKPD berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 52).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan Oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
3. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
4. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktifitas /layanan kegiatan dalam melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
6. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin di capai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
7. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan /layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ,yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Greged Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 .

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019–2024 yaitu : "***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman*** ”.

BUDAYA

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat

SEJAHTERA

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi

AGAMIS

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika

MAJU

Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

AMAN

Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional

Sedangkan Misi Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika
4. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional

PRIORITAS PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar

Renja Kecamatan Greged Tahun 2023

2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COPID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
- 13) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Seri Nomor 52).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Greged untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Greged.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun 2023 adalah :
 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Greged Tahun 2023 dimaksudkan untuk mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja
Renja Kecamatan Greged Tahun 2023

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Selain itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Greged Tahun 2023 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2023. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Greged Tahun 2023. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Kecamatan Greged ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Greged Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Greged Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Greged.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Greged.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Greged
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Greged.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GREGED
KABUPATEN CIREBON TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GREGED

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Greged dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Greged Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1.

Kecamatan Greged melaksanakan 2 (Dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kewilayahan dengan perincian sebagai berikut 1 (Satu) Program ,5 (lima) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan untuk Urusan Pemerintah dan 4 (empat) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan untuk Unsur Kewilayahan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON/KOTA

01. Perencanaan,Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
- 01.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 02.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 02.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

03. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 03.01 Penyedia Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 03.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 03.03 Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan
- 03.04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 03.05 Penyedia Bahan /Material
- 03.06 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 03.07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 04. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 04.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 05. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 05.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 05.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan
- 05.03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- 02.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- 02.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- 02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**
- 02.01 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- 03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**
- 03.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
- 03.01 Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

01. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

04.02 Koordinasi,Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

05.01 Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Kecamatan Greged melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kewilayahan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 1 (Satu) Program , 5 (Lima) Kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.012.968.848,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.848.536.140,00 sisa sebesar Rp. 164.433.708,00- atau tercapai sebesar 91,83 %,

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 5 (Lima) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan , dengan anggaran sebesar Rp. 616.599.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 616.111.000,00 sisa sebesar Rp. 488,000,00- atau tercapai sebesar 99,92 %.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Kecamatan Greged tersebut terinci sebagai berikut:

**Belanja Urusan,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Greged
Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA	2.629.568.848,00	2.460.647.140,00	168.921.708,00	93,58
BELANJA NON URUSAN	2.012.968.848,00	1.848.536.140,00	164.433.708,00	91,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.012.968.848,00	1.848.536.140,00	164.433.708,00	91,83

Renja Kecamatan Greged Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.580.000,00	8.580.000,00	0	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000,00	4.980.000,00	0	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.791.754.000,00	1.640.001.925,00	151.752.075,00	91,55
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.754.000,00	1.631.001.925,00	151.752.075,00	91,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.920.000,00	4.920.000,00	0	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.784.700,00	87.304.700,00	1.480.000,00	98,33
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.535.000,00	1.535.000,00	0-	100,00
Penyedia Peralatan Perlengkapan Kantor	60.469.000,00	60.469.000,00	0	100,00
Penyedia Bahan Logistik Kantor	9.500.000,00	9.020.000,00	480.000,00	94,94
Penyedia barang Cetak dan Pengadaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0-	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.560.000,00	0	100,00
Penyedia Bahan /Material	8.820.700,00	8.820.700,00	0	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	0	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.265.648,00	18.779.215,00	5.486.433,00	77,40
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20.085.648,00	14.599.215,00	5.486.433,00	72,70
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.065.500,00	93.870.300,00	7.195.200,00	92,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.240.000,00	32.010.000,00	6.230.000,00	83,79

Renja Kecamatan Greged Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.450.000,00	2.450.000,00	0	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.375.500,00	60.303.500,00	72.000,00	99,90
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN	616.599.000,00	616.111.000,00	488.000,00	99,92
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	418.870.000,00	414.418.000,00	4.452.000,00	98,93
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56.780.000,00	56.744.000,00	36.000,00	99,93
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	56.780.000,00	56.744.000,00	36.000,00	99,93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	28.550.000,00	28.550.000,00	0	100,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.550.000,00	28.550.000,00	0	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	333.540.000,00	329.124.000,00	4.416.000,00	98,70
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan	333.540.000,00	329.124.000,00	4.416.000,00	98,70
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.030.000,00	69.994.000,00	36.000,00	99,94
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	70.030.000,00	69.994.000,00	36.000,00	99,94
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.030.000,00	69.994.000,00	36.000,00	99,94
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	77.350.000,00	77.350.000,00	0	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	0	100,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0	100,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.350.000,00	42.350.000,00	0	100,00
Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	42.350.000,00	42.350.000,00	0	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0	100,00
Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.000.000,00	50.000.000,00	0	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	349.000,00	349.000,00	0	100,00
Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	349.000,00	349.000,00	0	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	349.000,00	349.000,00	0	100,00
JUMLAH BELANJA	2.629.568.848,00	2.460.647.140,00	168.921.708,00	93,58

Kecamatan Greged pada Tahun Anggaran 2021 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1) Urusan yang Melekat pada Kecamatan Greged (Program Non Urusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di Kecamatan Greged khususnya pada Sekretariat Kecamatan Greged. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Kecamatan Greged melaksanakan 1 (Satu) Program ,5 (Lima) Kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Pogram ,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Non Urusan
Kecamatan Greged
Tahun Anggaran 2021**

NO	Uraian Urusan,Perangkat Daerah,Bidang /Bagian,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
NON URUSAN		2.012.968.848,00	1.848.536.140,00	91,83
Kecamatan Greged				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.012.968.848,00	1.848.536.140,00	91,83
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.580.000,00	8.580.000,00	100,00
(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000,00	4.980.000,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.791.754.000,00	1.640.001.925,00	91,55
(1)	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.754.000,00	1.631.001.925,00	91,48
(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.920.000,00	4.920.000,00	100,00
(3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.784.700,00	87.304.700,00	98,33
(1)	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.535.000,00	1.535.000,00	100,00
(2)	Penyedia Peralatan Perlengkapan Kantor	60.469.000,00	60.469.000,00	100,00
(3)	Penyedia Bahan Logistik Kantor	9.500.000,00	9.020.000,00	94,94
(4)	Penyedia barang Cetak dan Pengadaan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
(5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
(6)	Penyedia Bahan /Material	8.820.700,00	8.820.700,00	100,00
(7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perpanjangan Urusan Pemerintah Daerah	24.265.648,00	18.779.215,00	77,40
(1)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20.085.648,00	14.599.215,00	72,70

Renja Kecamatan Greged Tahun 2023

NO	Uraian Urusan,Perangkat Daerah,Bidang /Bagian,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
(2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.065.500,00	93.870.300,00	92,90
(1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	38.240.000,00	32.010.000,00	83,79
(2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2.450.000,00	1.556.800,00	63,54
(3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.375.500,00	60.303.500,00	99,90

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GREGED

1) Program Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.580.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00,- atau tercapai sebesar 95,67 %.

Outcome kegiatan adalah Tercapainya Penyusunan Laporan Anggaran untuk Program Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.3.600.000,00 sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai sebesar 100,00%

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.980.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00 %

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.791.754.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.782.754.020,00 ,- sisa anggaran Rp. 8.999.980,00,- atau tercapai 99,49 %

Output kegiatan adalah Jumlah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kecamatan.

- (1). Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.782.754.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.631.001.925.00,- sisa anggaran Rp. 151.752.075.00,- atau tercapai 91,48 %.

Output kegiatan adalah Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Greged.

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai Kecamatan Greged.

- (2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,dengan alokasi anggaran Rp. 4.920.000.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.920.000.00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kegiatan Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Outcome kegiatan adalah Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 4.080.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.080.000,00,-sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kegiatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran .

Outcome kegiatan adalah Tercapainya Kegiatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.784.700,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.304.700,00,- sisa anggaran Rp. 1.480.000,00 atau tercapai 98,33 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- (1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,dengan alokasi anggaran Rp. 1.535.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.535.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00 %.

Output kegiatan adalah Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- (2). Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor,dengan alokasi anggaran Rp. 60.469.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.469.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00%

Output kegiatan adalah Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor.

Outcome kegiatan adalah Bertambahnya sarana peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung aktifitas kerja.

- (3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 9.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.020.000,00,- sisa anggaran Rp. 480.000,00,- atau tercapai 94,94%

Output kegiatan adalah Jumlah Persediaan Bahan Logistik Kantor

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan Bahan Logistik Kantor.

- (4). Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan , dengan alokasi anggaran Rp. 3.300.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.300.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00%

Output kegiatan adalah Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan.

- (5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran Rp. 1.560.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.560.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00%

Output kegiatan adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan lokal, regional, nasional.

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- (6). Penyediaan Bahan Material , dengan alokasi anggaran Rp. 8.820.700,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.820.700,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00%

Output kegiatan adalah Jumlah Bahan Material

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah Bahan Material Kantor.

- (7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD , dengan alokasi anggaran Rp. 2.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00%

Output kegiatan adalah Biaya Transport rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan pagu anggaran DPA

Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai untuk rapat koordinasi dan konsultasi .

3. Penyedia Jasa Perpanjangan Urusan Pemerintah Daerah ,dengan alokasi anggaran Rp. 24.265.648,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.779.215,00,- sisa anggaran Rp. 5.486.433,00,- atau tercapai 77,40%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Pembayaran Jasa Perpanjangan Urusan Daerah

- (1). Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ,dengan alokasi anggaran Rp. 20.085.648,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.599.215,00,- sisa anggaran Rp. 5.486.433,00,- atau tercapai 72,70 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik.

Outcome kegiatan adalah Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik.

- (2). Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,dengan alokasi anggaran Rp. 4.180.000,00,- .dan terealisasi sebesar Rp. 4.180.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100,00%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Outcome kegiatan adalah Terbayarnya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- 14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , dengan alokasi anggaran Rp. 101.065.500,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.870.000,00,- sisa anggaran Rp. 7.195.200,00,- atau tercapai 92,90%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- (1). Penyedia Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan ,dengan alokasi anggaran Rp. 38.240.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.010.000,00,- sisa anggaran Rp. 6.230.000,00,- atau tercapai 83,79 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan

Outcome kegiatan adalah Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan berdasarkan Jabatan.

- (2). Penyedia Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan ,dengan alokasi anggaran Rp. 2.450.000,00,- .dan terealisasi sebesar Rp. 1.556.800,00,- sisa anggaran Rp. 893.200,00,- atau tercapai 63,54%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan

Outcome kegiatan adalah Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan tidak tercapai karena ada pembayaran di awal tahun anggaran..

- (3). Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,dengan alokasi anggaran Rp. 60.375.500,00,- .dan terealisasi sebesar Rp. 60.303.500,00,- sisa anggaran Rp. 72.000,00,- atau tercapai 99,90%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan

Outcome kegiatan adalah Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan tidak tercapai karena ada pembayaran di awal tahun anggaran.

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan),Kecamatan Greged menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan tidak mendukung karena Kendaraan Dinas Operasional sudah tidak layak pakai.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,dialihkan karena refocusing Penangan Copid -19 sehingga tidak adanya kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Kurangnya tenaga TKK Kecamatan Greged.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Greged telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan sudah dilakukan penginventarisir Kendaraan Dinas yang sudah tidak layak pakai dan di ajukan untuk penghapusan barang ke Bagian Aset Setda Bagian Perlengkapan.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk saat ini hanya memelihara dan memperbaiki bangunan (ruangan) dengan pengecatan rutin.

1. Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

(1) Pelaksanan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan Fungsi penunjang ini merupakan tugas utama dari Kecamatan Greged dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang ini, Kecamatan Greged Melaksanakan 5 (Lima) Program ,8 (Delapan) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan sebagai mana tercantum dalam tabel berikut :

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan
 Kecamatan Greged
 Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian Urusan,Perangkat Daerah,Bidang/Bagian,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan		616.599.000,00	612.111.000,00	99,28
Kecamatan Greged				
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	418.870.000,00	414.418.000,00	98,93
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56.780.000,00	56.744.000,00	99,93
(1)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	56.780.000,00	56.744.000,00	99,93
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	28.550.000,00	28.550.000,00	100,00
(1)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.550.000,00	28.550.000,00	100,00
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	333.540.000,00	329.124.000,00	98,70
(1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan	333.540.000,00	329.124.000,00	98,70

Renja Kecamatan Greged Tahun 2023

	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.030.000,00	69.994.000,00	99,94
	(1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.030.000,00	69.994.000,00	99,94
	(2)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.030.000,00	69.994.000,00	99,94
	3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77.350.000,00	77.350.000,00	100,00
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	(1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.350.000,00	42.350.000,00	100
	1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	42.350.000,00	42.350.000,00	100
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	(1)	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	349.000,00	349.000,00	100
	1	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	349.000,00	349.000,00	100
	(1)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	349.000,00	349.000,00	100

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ,dengan alokasi anggaran Rp. 418.870.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 414.418.000,00,- sisa anggaran Rp. 4.452.000,00,- atau tercapai 98,93%.

Outcome Program adalah Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

- (1). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ,dengan alokasi anggaran Rp. 56.780.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.744.000,00,- sisa anggaran Rp. 36.000,00,- atau tercapai 99,93 %.

Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- (2). Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ,dengan alokasi anggaran Rp. 56.780.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.744.000,00,- sisa anggaran Rp. 36.000,00,- atau tercapai 99,93 %.

Output kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan,dengan alokasi anggaran Rp. 28.550.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.550.000,00,- sisa anggaran Rp. 0, 00,- atau tercapai 100 %

Output kegiatan adalah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

- (1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan sebesar Rp. 28.550.000,00,- dan terealisasi Rp. 28.550.000,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainya yang dilimpahkan ,dengan alokasi anggaran Rp. 333,540.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 329.124.000,00,- sisa anggaran Rp. 4.416.000, 00,- atau tercapai 98,70 %

Output kegiatan adalah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainya.

- (1). Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lainya , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.540.000,00,- dan terealisasi Rp. 329.124.000,00,- sisa anggaran Rp. 4.416.000,00,- atau tercapai 98,70 %.

Output kegiatan adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainya yang dilimpahkan.

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainya yang dilimpahkan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ,dengan alokasi anggaran Rp. 70.030.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.994.000,00,- sisa anggaran Rp. 36.000, 00,- atau tercapai 99,94 %

Outcome Program adalah Terpenuhinya Urusan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.030.000,00 dan terealisasi Rp. 69.994.000,00,- sisa anggaran Rp. 36.000.00,- atau tercapai 99,94 %.

Output kegiatan adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .

- (1). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.030.000,00,- dan terealisasi Rp. 69.994.000,00,- sisa anggaran Rp. 36.000,00,- atau tercapai 99,94 %.

Output kegiatan adalah Urusan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Urusan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ,dengan alokasi anggaran Rp. 77.350.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.350.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %

Outcome Program adalah Terpenuhinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00,- dan terealisasi Rp. 35.000.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00,- dan terealisasi Rp. 35.000.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan.

Outcome Terpenuhinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.350.000,00,- dan terealisasi Rp. 42.350.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- .1. Koordinasi/Sinergi Dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.350.000,00,- dan terealisasi Rp. 42.350.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output Koordinasi/Sinergi Dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Outcome Terpenuhinya kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum ,dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %

Outcome Program adalah Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan terealisasi Rp. 50.000.000,00,- sisa anggaran Rp.0,00,-atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

- (2) Fasilitasi ,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan terealisasi Rp. 50.000.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Fasilitasi ,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi,) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya Fasilitasi ,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ,dengan alokasi anggaran Rp. 349.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 349.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %

Outcome Program adalah Terpenuhinya Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak.

- (1) Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349.000,00,- dan terealisasi Rp. 349.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- (2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349.000,00,- dan terealisasi Rp. 349.000,00,- sisa anggaran Rp. 0,00,- atau tercapai 100 %.

Output kegiatan adalah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Outcome Program adalah Terpenuhinya Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak.

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Urusan Kewilayahan, Kecamatan Greged menghadapi masalah sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ada beberapa belanja yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi refocusing anggaran penanganan Covid-19 yaitu Kegiatan Paskibraka 17 Agustus 2021 dan Kegiatan Mamin Pelaksanaan Kegiatan MTQ-47 di Kecamatan Greged sebagai Panlok (Panitia Lokal).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Greged telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

Pegawai dan Instansi di Wilayah Kerja Kecamatan Greged tetap melaksanakan kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus 2021 secara Virtual dengan tetap melaksanakan Proses dan Menonaktifkan Kegiatan Paskibra dan Kegiatan MTQ Ke-47 sesuai dengan Anggaran dan Alhamdulillah meraih juara umum Tingkat Kabupaten Cirebon.

1.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GREGED

Dalam melaksanakan tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon , mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - i. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - ii. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - iii. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - iv. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - v. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah lain ditingkat Kecamatan;
 - vi. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 - vii. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/atau kelurahan;
 - viii. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat Daerah lain yang ada di Kecamatan;
 - ix. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - x. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Greged.

- Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah.

- Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah)
- Pengetahuan Administrasi desa masih kurang sehingga perlu adanya pembinaan tentang Admintrasi Desa.
- Masih kurangnya pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi lemah baik dalam pendidikan maupun kesehatan.
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
- Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Greged dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

- Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Greged dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Greged, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Greged.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat maka sumber daya yang ada baik SDM maupun sarana prasarana masih kurang memadai.
- Adanya tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik yang cepat.
- Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Greged secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat.
- Secara eksternal Kecamatan Greged lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian bidang Pertanian . Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Greged. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Greged harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

- Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

1.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, yang bertugas Mewujudkan reformasi sistem birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

1.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, maka Kecamatan Greged mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat .

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2022 akan dilaksanakan sebagai berikut :

Non Urusan : 1 (Satu) program, 5 (Lima) Kegiatan dan 16 (Enam Belas)
Sub Kegiatan

Unsur Kewilayahan : 4 (Empat) program, 6 (Enam) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub
Kegiatan

Dengan Perincian Program dan Kegiatan :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON/KOTA

01. Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Tahun 2022, dengan Target Capaian Kinerja 100%.

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 66.769.000,00,-

01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 25.345.000,00.-

- 01.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 41.424.000,00.-

02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Laporan Pengadministrasian Keuangan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.041.867.000,00.-

- 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.038.267.000,00.-

- 02.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangana akhir Tahun yang dihasilkan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.800.000,00.-

- 02.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangana yang dihasilkan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.800.000,00.-

03. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Komponen Penunjang Kinerja Pelayanan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 46.057.800,00.-

- 03.01 Penyedia Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Komponen Listrik Yang di sediakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.067.400,00.-

- 03.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Peralatan kantor Yang disediakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 25.679.000,00.-

- 03.03 Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Barang Cetakan dan pengadaan yang disediakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.171.900,00.-

- 03.04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.560.000,00.-

- 03.05 Penyedia Bahan /Material

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Bahan Material yang disediakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 4.739.500,00.-

- 03.06 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang disediakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 7.440.000,00.-

- 03.07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.400.000,00.-

04. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 22.473.600,00.-

- 04.01 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Rekening Yang Dibayarkan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 22.473.600,00.-

05. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 76.284.200,00.-

- 05.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 36.180.000,00.-

- 05.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaanya untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

- Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.882.000,00.-
- 05.03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 37.222.200,00.-
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 95.397.000,00.-
- 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 61.512.000,00.-
- 02.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 42.500.000,00.-
- 02.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%
Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 19.012.000,00.-

02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 12.771.000,00.-

02.01 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 12.771.000,00.-

03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 21.114.000,00.-

03.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Yang dilaksanakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 21.114.000,00.-

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga yang dilaksanakan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 23.530.500,00.-

01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Jenis Koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 23.530.500,00.-

03.01 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Validasi Program Kerja antara Stakolder di Wilayah Kecamatan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 23.530.000,00.-

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Prosentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 19.612.000,00.-

01. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Rapat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Trantib untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 19.612.000,00.-

04.02 Koordinasi,Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Greged untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 19.612.000,00.-

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00.-

01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00.-

05.01 Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Sasaran target Capaian Kinerja yang ingin di capai adalah Jumlah Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional untuk Tahun 2022,dengan Target Capaian Kinerja 100%

Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00.-

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, (Terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GREGED

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Greged Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Greged serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Greged dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Greged, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Melalui penyusunan Renja Kecamatan Greged Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2022. Dari data dan analisis ini, dapat kita ketahui sejauh mana penilaian dan progres report per tahunnya, sehingga pembangunan yang berkesinambungan diharapkan akan terwujud. Dengan demikian maka hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non-fisik dapat dirasakan oleh seluruh stake holder Kecamatan Greged.

Selanjutnya sebagai kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Renja Kecamatan Greged ini bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi Kecamatan Greged untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD, sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh SKPD berkewajiban untuk bersinergi melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- 2) Seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahun;
- 3) Seluruh SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2022, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Greged dan mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Greged, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2022 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

Greged, Februari 2022

CAMAT GREGED,



RATNA KARTIKA, S.AP.M, Si

Pembina

NIP. 19680706 199307 2 001

LAMPIRAN



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SKPD: 7-1.0-0.0-0.38. KECAMATAN GREGED

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				2.045.007.400				3.581.366.172
0.00.	NON BIDANG URUSAN				2.045.007.400				3.581.366.172
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah		100 Prosen	2.045.007.400			100 Prosen	3.300.916.172
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	69.169.000	PIS		6 Jenis	111.632.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kecamatan Greged	3 Dokumen	26.545.000	PIS		0 Dokumen	-
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kecamatan Greged	4 Laporan	42.624.000	PIS		0 Laporan	-
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		1 Jenis	1.822.680.000	PIS		1 Jenis	2.849.665.101
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.	Kecamatan Greged	16 Pegawai	1.814.754.000	PIS		0 Pegawai	-
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	Kecamatan Greged	1 Laporan	3.963.000	PIS		0 Laporan	-
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Kecamatan Greged	1 Laporan	3.963.000	PIS		0 Laporan	-
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	-	PIS		25 Orang	20.000.000
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Kecamatan Greged	25 Stell	-			0 Stell	-
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		7 Jenis	90.578.800	PIS		7 Jenis	147.619.071
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Disediakan	Kecamatan Greged	8 Jenis	2.067.400	PIS		0 Jenis	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang disediakan	Kecamatan Greged	8 Jenis	59.804.000	PIS		0 Jenis	-
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	KABUPATEN CIREBON	40 Jenis	-			0 Jenis	-
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Greged	6 Jenis	4.249.200	PIS		0 Jenis	-
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan Greged	2 Jenis	1.560.000	PIS		0 Jenis	-
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Kecamatan Greged	24 Jenis	7.658.200	PIS		0 Jenis	-
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	Kecamatan Greged	30 Jamuan	10.440.000	PIS		0 Jamuan	14.000.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (Dalam daerah)	Kecamatan Greged	48 Kali	4.800.000	PIS		0 Kali	-
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	-	PIS		4 Jenis	300.000.000
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kecamatan Greged	4 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	22.473.600	PIS		2 Jenis	28.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kecamatan Greged	2 Rekening	22.473.600	PIS		0 Rekening	-
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN CIREBON	5 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	40.106.000	PIS		5 Jenis	144.000.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara.		9 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya.	Kecamatan Greged	1 Unit	2.882.000	PIS		1 Unit	-
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kecamatan Greged	1 Unit	37.224.000	PIS		0 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				240.984.500				776.564.166
7.01.	KECAMATAN				240.984.500				776.564.166
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	152.430.000			100 Prosen	333.426.180
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	88.455.000	PIS		2 Jenis	155.864.340
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- (Desa Greded - Kecamatan greded)	4 Laporan	42.500.000	PIS		0 Laporan	-
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Kecamatan Greded	12 Laporan	45.955.000	PIS		0 Laporan	-
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Kegiatan	28.731.000	PIS		3 Kegiatan	62.561.840
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan Greded	12 Laporan	28.731.000	PIS		0 Laporan	-
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	35.244.000	PIS		3 Jenis	115.000.000
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Greded	12 Laporan	-			2 Laporan	-
7.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan	Kecamatan Greded	12 Laporan	-			0 Laporan	-
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	Kecamatan Greded	12 Laporan	35.244.000	PIS		0 Laporan	-
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	46.330.500			100 Prosen	110.000.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	46.330.500	PIS		3 Jenis	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Program Kerja antar Stakeholder di Wilayah Kerja Kecamatan	Jln Imam Bonjol No 34 Sindangkempeng (Desa Sindang kempeng - Kecamatan greged)	3 Laporan	46.330.500	PIS		3 Laporan	50.000.000
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Kabupaten Cirebon	12 Kegiatan	-			0 Kegiatan	-
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	42.224.000			100 Prosen	120.000.000
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	-	PIS		12 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	4 Laporan	-			0 Laporan	-
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	42.224.000	PIS		12 Laporan	70.000.000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan Greged	12 Laporan	42.224.000	PIS		0 Laporan	-
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	-			100 Prosen	200.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	-	PIS		8 Jenis	200.000.000
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- (- Kecamatan greged)	4 Laporan	-			4 Laporan	-
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan		100 Prosen	-			0 Prosen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	-			100 Prosen	60.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 BA	-	PIS		1 BA	60.000.000
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Greged	1 kegiatan	-			0 kegiatan	-
J U M L A H					2.285.991.900				4.357.930.338

Sumber, 06 Desember 2022
CAMAT GREGED



RATNA KARTIKA, S.AP, M.Si.

Pembina

NIP. 19680706 199307 2 001